

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Oleh:

¹Iqbal Kinanta Putra, ²Sri Rahayu, ³Rita Friyani

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

e-mail :iqbalkinantaputra@gmail.com¹, sri_rahayu@unja.ac.id², ritafriyani6@gmail.com³

ABSTRACT

Regional government financial performance is the level of achievement of work results in the field of regional finance and a tool that can be used to record, measure, assess and achieve effective and efficient implementation of regional financial management. This research aims to examine the influence of local original income, balancing funds, excess budget financing and regional expenditure on the financial performance of district/city regional governments in Jambi province for the 2018-2022 period. The data used is secondary data obtained from the Jambi Province DJPK website and the total data is 55 from 11 district/city samples obtained using non-probability sampling techniques. The results of the research reveal that the regional original income variable has a positive effect on the financial performance of regional governments and the remaining variables over budget financing and regional expenditure have a negative effect on the financial performance of regional governments, but the balancing funds variable has no effect on the financial performance of regional governments. The results of this research indicate the importance of increasing regional funds in improving government performance and services to the community.

Keywords: *Regional Original Income, Balancing Funds, Excess Budget Financing, Regional Expenditures, Regional Government Financial Performance.*

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jambi periode 2018-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website DJPK provinsi jambi dan jumlah data 55 dari 11 sampel Kabupaten/kota diperoleh dengan teknik non probability sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta variabel sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun untuk variabel dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa

pentingnya peningkatan dana daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sendiri berlandaskan acuan hukum sebagai implementasi tuntutan globalisasi dengan cara memberdayakan dalam bentuk memberikan kewenangan lebih luas, nyata, dan tanggung jawab dalam mengatur, memanfaatkan serta menggali sumber daya yang berpotensi di daerah.

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masa pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah, kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Febriyanti dkk., 2022)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Kinerja keuangan daerah adalah program atau kegiatan yang telah di capai pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari dokumen yang penting, di mana dokumen ini menyatakan bagaimana kondisi tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana, Hal ini membantu mengukur indikator kinerja keuangan dalam periode terakhir. Penilaian kinerja keuangan sangat penting dilakukan, karena dengan mengetahui kinerja keuangan maka dapat dijadikan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan. Penilaian kinerja keuangan daerah bertujuan agar para pengelola keuangan tidak semena-mena membelanjakan uangnya, tetapi menjadi lebih fokus terhadap target-target kinerja yang harus dicapai, pengukuran kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan antara kinerja actual dengan kinerja yang diharapkan (Sulistyo.,2018).

Fenomena yang terdapat pada penelitian ini adalah terjadinya penurunan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, salah satu penyebab terjadinya penurunan APBD ini karna pada awal tahun 2020 Indonesia di serang oleh wabah virus *Covid-19*, hingga setelah covid berlalu masih ada terdapat APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih menurun, yang mana ini memiliki dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun anggaran 2018-2022 rata-rata mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun dan hampir tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Penurunan PAD rata-rata di setiap Kabupaten/Kota terjadi karena dampak dari *Covid-19*, namun setelah *Covid-19* berlalu masih terdapat beberapa Kabupaten yang PAD nya masih menurun, seperti Kabupaten Bungo Tahun 2021 sudah mulai meningkat sebesar 198,75 miliar namun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 140,74 miliar, Kabupaten Kerinci ditahun 2021 sebesar 66,86 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 44,37 miliar, Kabupaten Batanghari ditahun 2021 sebesar 148,44 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 109,44 miliar, Kabupaten Tebo ditahun 2021 sebesar 92,92 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 59,68 miliar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditahun 2021 sebesar 118,53 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 112,06 miliar dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditahun 2021 sebesar 81,6 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 59,22 miliar. Yang mana hal tersebut mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi, sehingga penerimaan dari sumber PAD menurun/berkurang.

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ditahun 2020 rata-rata mengalami Penurunan, penyebab terjadinya penurunan ini salah satunya karna dampak dari wabah *Covid-19* yang mengakibatkan kepada menurunnya APBN pemerintah pusat dan mengakibatkan penurunan dana transfer ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, tetapi ditahun 2021 dan 2022 sudah kembali mengalami kenaikan namun jika dibandingkan tahun 2019 sebelum terjadinya wabah *covid-19* dengan tahun 2022 setelah wabah *covid-19* angka realisasi dana perimbangan masih dibawah capaian sebelum terjadinya wabah tersebut.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata terdapat angka yang naik turun tiap tahun, kenaikan terjadi rata-rata terdapat pada tahun 2022, sebagai gambaran pada Kabupaten Bungo tahun 2021 sebesar 5.82 miliar naik signifikan ditahun 2022 sebesar 154.51 miliar.

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata setiap tahun nya mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun dan masih belum mencapai target yang di anggarakan terlihat dari persentase nya, rata-rata penurunan terjadi pada tahun 2022 seperti yang terdapat pada Kota Jambi tahun 2021 mencapai angka sebesar 1.740.36 miliar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.633.46 miliar. Karena Belanja daerah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mana terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang menyimpulkan variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah memiliki atau tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Verawaty dkk., (2020) meyakini bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Putri dan Darmayanti (2019). Penelitian mereka membuktikan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Lintangi dkk., (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Insani dkk., (2023), penelitian mereka membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ratnasari dan Meirini., (2022) menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Putri dan Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Armaja dkk., (2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan hasil Defitri., (2021). Penelitian mereka

membuktikan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Yuesti dkk, 2020). Tujuan dari akuntansi sektor publik untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial dalam kebijakan keuangan pemerintah. Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu proses akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapain dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Mahmudi (2019) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik juga dalam hal pengelolaan keuangannya, baik dalam hal pengelolaan pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh daerah tersebut. Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah Rasio efektivitas menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingginya rasio efektivitas, menggambarkan pemerintah daerah mampu dalam mencapai target penerimaan PAD. Pemerintah daerah dikatakan efektif dalam pengelolaan keuangan jika rasio efektivitas mencapai nilai lebih dari 100%

Pendapatan Asli Daerah

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan semua potensi sumber daya ekonomi asli daerah yang dapat dijadikan penerimaan daerah. Berdasarkan hasil penelitian Insani, dkk. (2023) pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Heryanti, dkk. (2019) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya pendapatan asli daerah maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian Maulina, dkk. (2021) dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan, (2020) dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014-2018.

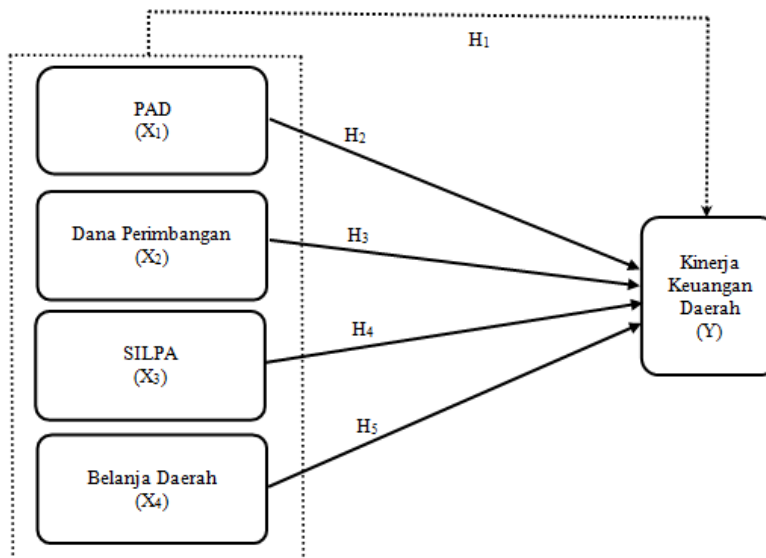
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampuan penerima PAD, pelampuan penerimaan pendapatan transfer, pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampuan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian Ratnasari dan Meirini, (2022) Selisih lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Adanya angka SILPA yang rendah menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan strategis yang digunakan sehingga dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari rakyat untuk dikembalikan pada rakyat dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Djuniar dan Zuraida, (2018) selisih lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah dikenal juga sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan hasil penelitian Indah dan Halmawati, (2021) belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan semakin tinggi belanja daerah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi juga kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armaja, dkk. (2017) Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

H₁ : PAD, Dana Perimbangan, SILPA, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

H₃ : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

H₄ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

H₅ : Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain (Sujarweni, 2020).

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis Data Kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang telah di publikasi kan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022. Data yang dikumpulkan dan diolah pada penelitian ini berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan alamat website www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang berjumlah 9 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PAD, Dana Perimbangan, SILPA dan Belanja Daerah

pada realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022 dengan menggunakan metode *Non Probability* sampling. Jenis *non probability* sampling yang digunakan penulis adalah sampling jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang mana jumlah sampel yang digunakan yaitu 11 Kabupaten/kota dengan periode penelitian 5 tahun, maka keseluruhan unit sampel dalam penelitian ini yaitu 11 daerah kabupaten/kota x 5 tahun = 55 jumlah data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2018:19). Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel indenpenden (bebas). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual (error) pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. “Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskidisitas”(Ghozali, 2018). Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Model persamaan regresi yang di uji adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

A = Konstanta

b_{1,2,3,4} = Koefisien regresi dari variabel independen

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Perimbangan

X₃ = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

X₄ = Belanja Daerah

ε = error

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda yang diantaranya adalah uji F, uji t dan uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Pengujian uji t bertujuan untuk apakah masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian koefisien determinasi Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen, yaitu dengan menghitung koefisien determinasi (R^2).

Semakin besar adjusted R^2 maka suatu variabel independen maka menunjukkan semakin dominan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Hasil penelitian statistic deskriptif terdiri dari data nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar devisiasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Hasil statistic deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai minimum 3,85, nilai maksimum 24,89, nilai mean 8,8047 dengan standar deviasi 4,92472. Dana perimbangan (X2) memiliki nilai minimum 53,41, nilai maksimum 104,26, nilai mean 73,5667 dengan standar deviasi 8,30775. Sisa lebih pembiayaan anggaran (X3) memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 29,10, nilai mean 7,6935 dengan standar deviasi 5,39201. Belanja Daerah (X4) memiliki nilai minimum 90,21, nilai maksimum 126,73, nilai mean 99,9664 dengan standar deviasi 5,83015.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	55	3.85	24.89	8.8047	4.92472
Dana Perimbangan	55	53.41	104.26	73.5667	8.30775
SILPA	55	.00	29.10	7.6935	5.39201
Belanja Daerah	55	90.21	126.73	99.9664	5.83015
Kinerja Keuangan Daerah	55	59.77	151.39	96.9795	20.83186
Valid N (listwise)	55				

Uji Asumsi Klasik

Ringkasan hasil uji asumsi klasik terdapat pada tabel 2. hasil uji normalitas yang menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dengan nilai signifikansi *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang mana melebihi nilai alpa yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Berdasarkan hasil dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam peneltian ini memenuhi asumsi normalitas. hasil uji multikolonearitas diketahui bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* dari semua variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel tidak terjadi masalah multikolonearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* menunjukkan nilai singnifikan dari semua variabel memperoleh nilai lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari indikasi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* menunjukkan diperoleh nilai *Du* sebesar 1,7240, lebih kecil dari nilai *Durbin-Watson (Dw)* sebesar 2,055, dan lebih besar nilai 4-Du sebesar 2,276 dari nilai *Dw* ($1,7240 < 2,055 < 2,276$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya indikasi terjadi autokorelasi.

Tabel 2. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

No	Uji Asumsi Klasik	Hasil Pengujian		Kesimpulan
1	Uji Normalitas Kolomogorov-smirnov	Asym sig (2-tailed)	0,200	Memenuhi asumsi normalitas
2	Uji Multikolinearitas VIF	VIF	PAD 1,207 Dana Perimbangan 1,324 SiLPA 1,206 Belanja Daerah 1,104	Tidak terdapat masalah multikolinearitas
3	Uji Heteroskedastisitas Glejser	Sig	PAD 0,060 Dana Perimbangan 0,731 SiLPA 0,595 Belanja Daerah 0,290	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
4	Uji Autokorelasi Durbin-Watson	Dw	1,7240 < 2,055 < 2,276	Bebas dari gejala autokorelasi

Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memperlihatkan kekuatan hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 dapat diketahui bahwa konstanta (α) dengan nilai 216,813. Hal ini berarti apabila variabel PAD (X1), Dana Perimbangan (X2), SiLPA (X3) dan Belanja Daerah (X4) di asumsikan nilai nya 0, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) secara konstan bernilai 216,813.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	216.813	23.474		9.236	.000
	PAD	.584	.285	.138	2.052	.045
	Dana Perimbangan	.154	.177	.061	.874	.387
	Belanja Daerah	-1.263	.231	-.353	-5.458	.000
	SILPA	-1.308	.098	-.829	-13.407	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Uji Hipotesis

1. Uji f

Pengujian uji f bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana dan seberapa besar pengaruh dari variabel independen (bebas) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (terikat). Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

Tabel 4. Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18977.689	4	4744.422	53.230	.000 ^b
	Residual	4456.507	50	89.130		
	Total	23434.196	54			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, Belanja Daerah

2. Uji t

Pengujian uji t bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana dan seberapa besar pengaruh dari variabel independen (bebas) secara masing-masing (persial) terhadap variabel dependen (terikat). Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 diketahui variabel Pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel dana perimbangan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,387 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel belanja daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	216.813	23.474		9.236	.000
	PAD	.584	.285	.138	2.052	.045
	Dana Perimbangan	.154	.177	.061	.874	.387
	SiLPA	-1.308	.098	-.829	-13.407	.000
	Belanja Daerah	-1.263	.231	-.353	-5.458	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada Tabel 6. pengujian koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,795. Hal tersebut berarti bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen 79,5% dan sisanya 20,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan atau berada diluar dari penelitian yang dapat berupa variabel-variabel lain seperti ukuran pemerintah daerah (Lestari dan Dini.,2020), pertumbuhan ekonomi dan opini audit (Insani dkk., 2023), *Leverage* dan *Good Corporate Governance* (Rode dan Dewi.,2019), Kekayaan Daerah (Armaja dkk,2017) yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.810	.795	9.44088
a. Predictors: (Constant), SiLPA, Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah				

PEMBAHASAN

1. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, SiLPA, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hasil ini

menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,795 atau 79,5% yang artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah sebesar 79.5%.

Menurut Mahmudi (2019) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik juga dalam hal pengelolaan keuangannya, baik dalam hal pengelolaan pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh daerah tersebut.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$). Hal ini menunjukkan semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, jika PAD naik maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota naik atau meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Verawaty dkk, (2020), Insani dkk, (2023), Putri dan Ratnawati (2023), Febriyanti (2022), Sari dan Halmawati (2021), Maulina dkk, (2021) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyebab Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi karena rata-rata daerah mengalami peningkatan PAD sejak 5 tahun terakhir. Seperti yang terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur. Kenaikan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi jambi dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 1.211,73 Miliar terus mengalami peningkatan hingga 10% pada tahun 2022 sebesar 1.334,69 Miliar. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah sangat baik dalam menggali potensi sumber kekayaan yang ada di daerah sehingga salah satu sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan distribusi daerah terus meningkat, ini menunjukkan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus meningkat, walaupun pada tahun 2020 hampir seluruh daerah mengalami penurunan PAD rata-rata sebesar 7% dari tahun sebelumnya 2019, penurunan ini terjadi akibat wabah covid-19 melanda Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh aktivitas masyarakat harus dibatasi dan memperlambat perekonomian. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Meirini (2022), Machmud dan Radjak (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,387 yang lebih besar dari 0,05 ($0,387 > 0,05$), Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraini dan Artini

(2019) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penyebab Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi karena terdapat penurunan pada komposisi Dana Alokasi Khusus (DAK), penurunan terjadi ada pada realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada tahun 2018 sebesar 819,97 Miliar terus mengalami hingga 5% pada tahun 2022 sebesar 776,73 Miliar. Hal yang membuat penurunan terhadap DAK bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kebijakan pemerintah yang melakukan penggeseran dana alokasi khusus ke daerah yang lebih di prioritaskan untuk pembangunan daerah tertentu, serta ada perubahan fiskal dan anggaran pemerintah yang membuat DAK berdampak mengalami penurunan. Faktor lain yang membuat DAK menurun bisa terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga pemerintah menjaga keseimbangan Negara dan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lintang dkk, (2023), Insani dkk, (2023) yang menyatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa dana perimbangan yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti semakin tinggi SiLPA maka akan semakin menurun kinerja keuangan pemerintah daerah. SiLPA yang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan semakin dikit angka SiLPA dalam laporan keuangan menandai bahwa pembiayaan dilakukan dengan baik untuk membiayai kegiatan serta menutupi defisit yang terjadi sehingga tidak ada dana yang tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Meirini (2022), Djuniar dan Zuraida (2018) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penyebab lainnya sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh karena masih terdapat masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan SiLPA yang cukup signifikan, Jika dilihat pada tahun 2018 total SiLPA dari masing-masing daerah sebesar 1.015,94 Miliar mengalami kenaikan cukup signifikan hingga 25% pada tahun 2022 sebesar 1.272,24 Miliar. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan anggaran sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan dalam penggunaan anggaran dan mengurangi efektivitas penggunaan dana publik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis kelima diterima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti semakin tinggi Belanja Daerah maka akan semakin menurun Kinerja Keuangan Daerah. yang berarti semakin tinggi Belanja Daerah maka akan semakin menurun Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan

penelitian Saputri dan Kurnia (2020), yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata cenderung mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah terus melakukan peningkatan pembangunan demi kemajuan suatu daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat pada tahun 2018 perolehan dana belanja daerah sebesar 13.133,27 Miliar (96,17%) terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar 13.441,03 (96,23%). Penyebab lainnya belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah karena penggunaan belanja rutin seperti belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja modal yang mana ini berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan demi kemajuan suatu daerah. Dapat dilihat pada tahun 2018 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 4.995,33 Miliar lebih besar dari pada penggunaan dan untuk belanja modal hanya sebesar 2.890,53 Miliar. Pada tahun 2019 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.423,19 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 3.647,28 Miliar. Pada tahun 2020 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.343,71 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 1.658,71 Miliar. Pada tahun 2021 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.109,98 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 2.736,62 Miliar. Pada tahun 2022 penggunaan dana untuk belanja pegawai sebesar 5.067,41 Miliar lebih besar dibandingkan penggunaan dana untuk belanja modal yang hanya sebesar 2.608,92 Miliar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Defitri.,dkk (2021) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh PAD, dana perimbangan, SiLPA dan belanja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.
3. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.
5. Belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.

Saran

1. Saran bagi pemerintah
Hasil penelitian menunjukan bukti empiris yang bahwa adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran dan

belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan potensi sumber kekayaan di daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga dapat lebih memaksimalkan dana yang bersumber dari APBD dan APBN untuk untuk pembangunan daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Pada peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lainnya karena masih terdapat variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dan opini audit, *Leverage* dan *Good Corporate Governance* dan Kekayaan Daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada penelitian ini hanya menggunakan rasio efektivitas PAD, dan juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan daerah selain menggunakan rasio efektivitas. Dan keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N.K. & Artini, L.G.S. (2019). Pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8 (3), 1315 – 13458.
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168-181.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Lembah Dempo*, 11(1), 10-19.
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, 3(2), 445-455.
- Febriyanti, E. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 629-637.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1-21.
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 109-125.

- Lintangi, R. M. A., Yohani, & Hidayah, R. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah Periode 2019-2022. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 214-224.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th Ed)*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, S. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information Sysem, Management, Accounting And Research*, 5(2), 390-399.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. (2020). *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (2019). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Portal Data APBD. Diakses pada 1 Oktober 2023 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Putri, S. P., Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2068-2082.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834-2861.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Udayana*, 32(5), 1189-1199.
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-21.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Public*, 3(1), 43-59.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Undang-undang (UU) Tentang Pemerintah Daerah*.
- Verawaty., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 21-37.

Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Noah Aletheia.